

Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya di Provinsi Bali

I Nyoman Ariyoga*, I Made Bagus Andi Purnomo
Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Indonesia
*nyomanariyoga92@gmail.com

Abstract

The implementation of widyalaya education in Bali Province continues to face various challenges related to regulatory implementation, institutional governance, limited human resources, and insufficient support from stakeholders and local governments. These conditions indicate a gap between the policy demands of Hindu religious education and the actual practices of educational management in the field. This study aims to analyze the problems in the implementation of widyalaya education, particularly concerning regulatory adaptation, institutional management, the availability of educators, learning facilities, and external support for the sustainability of widyalaya institutions in Bali Province. This research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observations, in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and document studies involving principals, teachers, foundations, and stakeholders in Hindu education. The findings reveal that widyalaya institutions still encounter several significant obstacles, including unpreparedness in adapting to Minister of Religious Affairs Regulation Number 2 of 2024, limited educational personnel, low digital literacy, inadequate teaching materials and learning media, and suboptimal support from local governments in strengthening infrastructure, funding, and educational governance. The study demonstrates that the challenges faced by widyalaya are not merely internal institutional issues, but are also closely related to regional education policies and the broader support system for Hindu religious education in Indonesia. This research implies the importance of strengthening collaborative policies, improving human resource capacity, and developing data-based educational governance to support the sustainability of widyalaya as adaptive and high-quality Hindu educational institutions.

Keywords: Problems; Widyalyaya Education; Educational Governance; Hindu Education; Bali Province

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan Widyalyaya di Provinsi Bali masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan implementasi regulasi, tata kelola kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya dukungan *stakeholder* dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan pendidikan keagamaan Hindu dan praktik penyelenggaraan pendidikan di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penyelenggaraan pendidikan Widyalyaya, khususnya terkait adaptasi regulasi, pengelolaan kelembagaan, ketersediaan tenaga pendidik, sarana pembelajaran, dan dukungan eksternal terhadap keberlanjutan widyalaya di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, yayasan, serta pemangku kepentingan

pendidikan Hindu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Widyalyaya masih mengalami berbagai hambatan, meliputi ketidaksiapan adaptasi terhadap PMA Nomor 2 Tahun 2024, keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, rendahnya literasi digital, minimnya bahan ajar dan media pembelajaran, serta belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam penguatan sarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa problematika Widyalyaya tidak hanya bersifat internal kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pendidikan daerah dan sistem dukungan pendidikan keagamaan Hindu secara nasional. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan kebijakan kolaboratif, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan tata kelola pendidikan berbasis data untuk mendukung keberlanjutan widyalyaya sebagai lembaga pendidikan Hindu yang adaptif dan berkualitas.

Kata Kunci: Problematika; Pendidikan Widyalyaya; Tata Kelola Pendidikan; Pendidikan Hindu; Provinsi Bali

Pendahuluan

Pendidikan keagamaan memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, penguatan identitas budaya, dan transmisi nilai-nilai spiritual masyarakat. Dalam konteks agama Hindu, salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang berkembang adalah Widyalyaya, yaitu lembaga pendidikan bercirikan agama Hindu yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun nonformal berbasis nilai-nilai *dharma*, susastra *Veda*, *tattwa*, etika, dan tradisi ritual keagamaan Hindu.

Kehadiran Widyalyaya menjadi penting karena lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan akademik, tetapi juga berperan sebagai ruang pelestarian tradisi, budaya, dan pengetahuan keagamaan Hindu di tengah dinamika modernisasi pendidikan. Posisi Widyalyaya dalam sistem pendidikan nasional memperoleh penguatan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya. Regulasi tersebut menghadirkan kerangka hukum baru yang mengatur tata kelola kelembagaan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, penjaminan mutu, serta mekanisme pengawasan Widyalyaya secara lebih sistematis dan terstruktur.

PMA Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa Widyalyaya memiliki kedudukan yang setara dengan satuan pendidikan umum lainnya dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam aspek standar layanan pendidikan dan akreditasi kelembagaan (Prihatin, 2020). Kehadiran regulasi ini sekaligus menjadi respons atas persoalan administratif dan kelembagaan yang selama ini muncul dalam penyelenggaraan pendidikan Widyalyaya, seperti ketidakjelasan status lembaga, lemahnya sistem pendataan, belum optimalnya tata kelola kelembagaan, serta terbatasnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan pendidikan Hindu.

Pada aspek kurikulum, PMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan ruang integrasi antara Standar Nasional Pendidikan dengan kekhasan ajaran Hindu Nusantara melalui penguatan materi *tattwa*, susastra *Veda*, etika keagamaan, serta tradisi ritual Hindu. Penguatan kurikulum tersebut menjadi penting karena pendidikan keagamaan Hindu tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter religius dan pelestarian identitas budaya Hindu di Indonesia (Sukrawati et al., 2022; Supriadi et al., 2025). Selain itu, regulasi ini juga menekankan pentingnya profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, serta pengembangan

kompetensi pedagogik dan keagamaan Hindu guna meningkatkan mutu layanan pendidikan (Abdullah, 2022; Triwijayanti et al., 2022; Purwanti et al., 2025). Hal tersebut menjadi relevan mengingat Widyalaya selama ini masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, terutama terkait ketersediaan guru yang memiliki kompetensi pedagogik sekaligus pemahaman keagamaan Hindu yang memadai (Rifa'i, 2019).

Meskipun PMA Nomor 2 Tahun 2024 telah menghadirkan kerangka normatif yang relatif komprehensif, implementasi regulasi tersebut di tingkat operasional Widyalaya masih menghadapi berbagai tantangan empiris. Kebijakan pendidikan pada dasarnya menuntut adanya tata kelola lembaga yang akuntabel, transparan, adaptif, dan berkelanjutan, termasuk kepastian status kelembagaan, sistem pendanaan, standar mutu pendidikan, dan mekanisme pengawasan yang efektif (Alawiyah, 2017; Raharjo, 2014). Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa banyak Widyalaya masih mengalami kesenjangan antara tuntutan normatif kebijakan (*das sollen*) dengan praktik implementasi sehari-hari (*das sein*).

Widyalaya masih sering dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki daya saing rendah dibandingkan sekolah umum lainnya, baik dari aspek manajemen kelembagaan, kualitas pembelajaran, fasilitas pendidikan, maupun kapasitas sumber daya manusianya (Ana, 2024; Suda, 2017). Kesenjangan implementasi tersebut tampak pada beragamnya kondisi antar-Widyalaya, baik Widyalaya berbasis yayasan, Widyalaya berasrama, maupun Widyalaya kejuruan yang memiliki karakteristik tata kelola berbeda. Variasi kapasitas kelembagaan tersebut berdampak pada belum meratanya implementasi kurikulum, kualitas bahan ajar, kompetensi pendidik, sistem administrasi, hingga pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Selain itu, ketergantungan sebagian besar Widyalaya terhadap dukungan masyarakat dan yayasan lokal menyebabkan keberlanjutan program pendidikan sering kali tidak stabil. Pada sisi lain, sistem pengawasan, evaluasi program, dan mekanisme akuntabilitas kelembagaan juga belum berjalan secara optimal sehingga menghambat proses penjaminan mutu pendidikan Widyalaya secara berkelanjutan. Studi mengenai lembaga pendidikan keagamaan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sering kali berhenti pada level formalitas administratif apabila tidak diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan yang adaptif, diversifikasi pembiayaan, dan partisipasi komunitas yang terstruktur (Alim & Munib, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari adanya *research gap* antara konstruksi normatif regulasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 dengan realitas implementasi Widyalaya di lapangan. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pendidikan Hindu dalam konteks penguatan kurikulum, pendidikan karakter, atau pengembangan pendidikan keagamaan secara umum. Penelitian terdahulu juga cenderung menempatkan regulasi pendidikan sebagai kerangka normatif tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik tata kelola kelembagaan Widyalaya.

Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan kajian empiris yang secara spesifik mengkaji hubungan antara regulasi pendidikan Widyalaya dengan realitas operasional lembaga, khususnya pada aspek tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, sistem pembiayaan, penjaminan mutu, serta keterlibatan masyarakat dan yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan Hindu. Posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menelaah regulasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 secara normatif, tetapi juga menganalisis implementasi kebijakan tersebut secara empiris dalam konteks operasional Widyalaya.

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan implementasi regulasi, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan tata kelola pendidikan Widyalyaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi tata kelola pendidikan keagamaan Hindu sekaligus kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi kebijakan pendidikan Widyalyaya di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa regulasi pendidikan Widyalyaya tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi benar-benar mampu diimplementasikan secara efektif dalam mendukung kualitas pendidikan Hindu yang berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi penting karena keberhasilan implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 akan menentukan arah penguatan kelembagaan Widyalyaya sebagai institusi pendidikan keagamaan Hindu yang modern, adaptif, kompetitif, namun tetap berakar pada nilai-nilai *dharm*a dan budaya Hindu Nusantara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan pendidikan dan tata kelola kelembagaan. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami secara mendalam hubungan antara regulasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 dengan praktik implementasinya di tingkat Widyalyaya.

Analisis penelitian difokuskan pada aspek kepatuhan regulasi, sistem tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, stabilitas pendanaan, penjaminan mutu pendidikan, serta keterlibatan yayasan dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Widyalyaya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana implementasi regulasi mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi Widyalyaya di lapangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam implementasi tata kelola Widyalyaya jenjang utama pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena kontekstual terkait kesenjangan antara regulasi pendidikan Widyalyaya dengan realitas implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan pada beberapa Widyalyaya jenjang utama di Provinsi Bali yang dipilih berdasarkan variasi karakteristik kelembagaan, baik berbasis yayasan, berasrama, maupun berbasis komunitas keagamaan Hindu. Penelitian berlangsung selama enam bulan, yaitu Januari-Juni 2025. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD), sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, arsip kelembagaan, laporan program, serta regulasi terkait penyelenggaraan Widyalyaya. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan pendidikan Widyalyaya.

Jumlah informan sebanyak 18 orang yang terdiri atas pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, pengelola yayasan pendidikan Hindu, kepala Widyalyaya, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Kriteria informan meliputi keterlibatan langsung dalam tata kelola atau proses pembelajaran Widyalyaya, memahami implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024, serta memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam aktivitas kelembagaan Widyalyaya. Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar analisis dokumen. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode melalui perbandingan data hasil observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi dari berbagai

informan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian. Selain itu, *member check* dilakukan kepada beberapa informan guna memastikan kesesuaian interpretasi data dengan kondisi empiris di lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model Miles dan Huberman. Data dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi pola, makna, serta hubungan terkait implementasi regulasi, tata kelola kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem pembiayaan, dan penjaminan mutu Widyalyaya dalam menjembatani kesenjangan antara tuntutan normatif kebijakan (*das sollen*) dengan praktik empiris di lapangan (*das sein*).

Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Regulasi dan Tata Kelola Widyalyaya Pasca PMA Nomor 2 Tahun 2024

Pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Widyalyaya sebagai lembaga pendidikan keagamaan Hindu formal dalam sistem pendidikan nasional. Regulasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum terkait tata kelola kelembagaan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembiayaan, serta mekanisme penjaminan mutu Widyalyaya. Dalam praktiknya, PMA Nomor 2 Tahun 2024 diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang sebelumnya muncul pada penyelenggaraan pendidikan Widyalyaya, khususnya terkait legitimasi kelembagaan, penguatan administrasi pendidikan, dan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi Widyalyaya sebagai lembaga pendidikan formal Hindu.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 masih menghadapi berbagai persoalan di tingkat operasional. Permasalahan tersebut meliputi aspek tata kelola kelembagaan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, pengelolaan administrasi pendidikan, kapasitas sumber daya manusia, hingga rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Widyalyaya. Meskipun regulasi baru telah memberikan perubahan nomenklatur dan penguatan legalitas kelembagaan, sebagian besar Widyalyaya masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan standar tata kelola yang diharapkan pemerintah.

Menurut I Ketut Trika Adi Ana, sebagai Ketua Yayasan Adhi Prima menyampaikan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan dukungan masyarakat terhadap keberadaan Widyalyaya. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat masih menjadi persoalan utama dalam pengembangan lembaga pendidikan Hindu, serta masyarakat kurang antusias dengan minimnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Widyalyaya (Wawancara, 3 Agustus 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi belum secara otomatis diikuti oleh penguatan legitimasi sosial Widyalyaya di tengah masyarakat.

Dalam konteks fungsionalisme struktural, kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara struktur regulatif dengan struktur sosial masyarakat. Regulasi telah dibentuk untuk memperkuat sistem pendidikan Hindu, namun fungsi integratif lembaga pendidikan belum sepenuhnya berjalan karena dukungan sosial masyarakat masih rendah. Permasalahan lain juga terlihat pada aspek pengakuan kelembagaan dan administrasi pendidikan. Menurut Ketut Pasek Gunawan selaku Ketua Yayasan Widya Santi menjelaskan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kebingungan dan ketidaksesuaian persepsi terkait status kelembagaan Widyalyaya sebagai lembaga pendidikan formal.

Secara aturan Widyalyaya adalah lembaga formal, tetapi dalam praktiknya masih ada anggapan bahwa sekolah Hindu belum sepenuhnya setara dengan sekolah formal lainnya (Wawancara, 2 November 2025). Kondisi tersebut berdampak pada proses administrasi

kelembagaan, akses bantuan pendidikan, serta kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan Widyalyaya. Hasil penelitian juga menemukan bahwa beberapa Widyalyaya masih mengalami keterbatasan dalam pengelolaan data kelembagaan, sistem administrasi pendidikan, dan penyesuaian standar tata kelola sesuai ketentuan PMA Nomor 2 Tahun 2024.

Ketidaksiapan administrasi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak merata antar-lembaga. Menurut Asnawa selaku pengelola Pratama Widyalyaya Rare Semesta juga menunjukkan bahwa persoalan regulasi pada Widyalyaya berdampak terhadap persepsi masyarakat secara lebih luas terhadap keberadaan pendidikan Hindu formal dan masyarakat jadi banyak bertanya-tanya dan tidak yakin terhadap keberlanjutan Widyalyaya yang ada di Provinsi Bali (Wawancara, 3 November 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan tidak hanya berdampak pada aspek internal kelembagaan, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan Hindu secara keseluruhan.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, gangguan pada subsistem regulasi dan tata kelola kelembagaan dapat memengaruhi stabilitas subsistem lain, termasuk legitimasi sosial, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan institusi pendidikan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024. Beberapa Widyalyaya masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi keagamaan Hindu yang sesuai dengan standar pendidikan formal.

Di sisi lain, keterbatasan pendanaan juga memengaruhi kemampuan Widyalyaya dalam meningkatkan kualitas sarana-prasarana, pengembangan kurikulum, dan penguatan sistem manajemen pendidikan. Sebagian besar Widyalyaya masih bergantung pada dukungan yayasan dan partisipasi masyarakat sehingga keberlanjutan program pendidikan sering kali tidak stabil. Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara tuntutan normatif regulasi dengan kondisi faktual Widyalyaya di lapangan.

Regulasi telah memberikan dasar hukum dan arah tata kelola yang lebih jelas, namun pada tingkat implementasi masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dukungan masyarakat, dan konsistensi pembinaan pemerintah. Dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, Widyalyaya merupakan bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi menjaga transmisi nilai, pendidikan karakter, dan integrasi sosial masyarakat Hindu.

Ketika salah satu unsur dalam sistem, seperti regulasi, legitimasi sosial, atau tata kelola kelembagaan tidak berjalan optimal, maka akan muncul disfungsi yang berdampak pada stabilitas keseluruhan sistem pendidikan Hindu. Oleh karena itu, implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 memerlukan strategi penguatan yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga menyentuh aspek penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem administrasi pendidikan, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap Widyalyaya sebagai lembaga pendidikan formal Hindu.

Hasil penelitian ini sekaligus memperlihatkan bahwa Widyalyaya memiliki potensi besar sebagai lembaga pendidikan Hindu yang adaptif dan berkelanjutan apabila didukung oleh tata kelola yang kuat, regulasi yang implementatif, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Dengan demikian, penguatan Widyalyaya tidak cukup hanya dilakukan melalui

perubahan regulasi, tetapi juga melalui penguatan ekosistem pendidikan Hindu secara menyeluruh agar tujuan pendidikan keagamaan Hindu dapat tercapai secara optimal di tengah dinamika perubahan sosial masyarakat modern.

2. Problematika Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 Pada Penyelenggaraan Widyalyaya

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya pada dasarnya hadir untuk memperkuat legitimasi pendidikan Hindu formal melalui pengaturan tata kelola kelembagaan, kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan, serta penjaminan mutu pendidikan. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan pendidikan Hindu, khususnya terkait kepastian status kelembagaan dan standardisasi penyelenggaraan Widyalyaya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 masih menghadapi berbagai problematika pada tingkat operasional Widyalyaya, terutama berkaitan dengan kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, pendanaan, dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Widyalyaya sebagai lembaga pendidikan formal Hindu.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa problematika utama implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 terletak pada belum meratanya kesiapan tata kelola antar Widyalyaya. Beberapa lembaga pendidikan seperti Utama Widyalyaya Astika Dharma, Sila Kertha Raharja, dan Utama Widyalyaya Kejuruan Widya Wisata telah berupaya menyesuaikan sistem pengelolaan kelembagaan sesuai standar regulasi baru. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala administratif dan kelembagaan, terutama terkait penyesuaian kurikulum, pengelolaan data pendidikan, penyediaan sarana-prasarana, serta pemenuhan standar tenaga pendidik.

Ketua pengelola Utama Widyalyaya Astika Dharma, menjelaskan bahwa perubahan regulasi menuntut penyesuaian administrasi dan tata kelola yang tidak mudah dilakukan oleh lembaga pendidikan Hindu yang sebelumnya berkembang secara mandiri berbasis yayasan dan komunitas, perlu adanya penyesuaian akan banyak hal mulai dari administrasi sekolah, kurikulum, hingga sistem pelaporan (Wawancara, 12 Juli 2025). Tidak semua Widyalyaya memiliki kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk langsung mengikuti standar baru. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa problem implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga kesiapan internal lembaga dalam menjalankan tuntutan administratif dan standar kelembagaan yang baru.

Dalam perspektif tata kelola pendidikan, perubahan regulasi yang tidak diikuti penguatan kapasitas institusi berpotensi menimbulkan ketimpangan implementasi antar-lembaga pendidikan. Permasalahan serupa juga ditemukan pada aspek sumber daya manusia. Menurut pengelola Sila Kertha Raharja, masih terdapat keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik sekaligus pemahaman keagamaan Hindu sesuai standar pendidikan formal (Wawancara, 18 Juli 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 masih terkendala oleh keterbatasan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia.

Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kurikulum Widyalyaya yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan kekhasan ajaran Hindu. Dalam konteks fungsionalisme struktural, lemahnya kapasitas tenaga pendidik dapat memengaruhi fungsi pendidikan sebagai media transmisi nilai, pengetahuan, dan integrasi sosial masyarakat Hindu. Selain aspek sumber daya manusia, problematika juga terlihat pada pembiayaan pendidikan dan penyediaan sarana-prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian

besar Widyalyaya masih sangat bergantung pada dukungan yayasan dan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan lembaga dalam memenuhi standar pendidikan menjadi tidak merata. Menurut pengelola Utama Widyalyaya Kejuruan Widya Wisata menjelaskan bahwa pengembangan fasilitas pendidikan sering kali terkendala keterbatasan dana operasional guna untuk memenuhi standar sarana-prasarana sesuai regulasi tentu membutuhkan biaya besar, sementara sumber pendanaan yang masih terbatas dan sebagian besar bergantung pada dukungan masyarakat (Wawancara, 20 Juli 2025). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan dukungan pembiayaan yang memadai.

Akibatnya, beberapa Widyalyaya mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk pengembangan fasilitas belajar, laboratorium, dan media pembelajaran berbasis teknologi. Problematika lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap posisi Widyalyaya sebagai lembaga pendidikan formal Hindu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang Widyalyaya sebagai lembaga pendidikan alternatif yang memiliki daya saing lebih rendah dibandingkan sekolah umum. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak pada Widyalyaya, terutama pada jenjang menengah dan kejuruan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 tidak terletak pada substansi regulasinya, melainkan pada kesiapan struktural dan kultural dalam pelaksanaannya. Regulasi telah memberikan kerangka normatif yang cukup jelas bagi penyelenggaraan Widyalyaya, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek tata kelola kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan pendidikan, sarana-prasarana, serta legitimasi sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 memerlukan dukungan yang lebih komprehensif melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan administrasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai posisi dan fungsi Widyalyaya dalam sistem pendidikan nasional.

3. Ketidaksiapan Widyalyaya Terhadap Adaptasi Regulasi Baru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi baru dalam penyelenggaraan Widyalyaya belum sepenuhnya diikuti kesiapan kelembagaan pada aspek manajerial, kelembagaan, dan teknologi. Ketidaksiapan tersebut terlihat pada proses penyesuaian tata kelola pendidikan, penguatan administrasi berbasis digital, pengembangan sumber daya manusia, serta perubahan sistem pengawasan pendidikan yang semakin terstandarisasi. Temuan penelitian pada Utama Widyalyaya Astika Dharma Karangasem, Utama Widyalyaya Sila Kertha Raharja Jembrana, dan Utama Widyalyaya Kejuruan Saraswati Singaraja menunjukkan bahwa secara umum lembaga telah berupaya menjalankan tata kelola pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 dan kebijakan teknis pendidikan terbaru, namun proses adaptasi masih berlangsung secara bertahap dan menghadapi berbagai kendala operasional. Pada dimensi manajerial, ketidaksiapan terlihat pada aspek perencanaan, pengelolaan pembiayaan, dan sistem pengawasan pendidikan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Widyalyaya telah menyusun program pengembangan kelembagaan, termasuk penguatan sarana-prasarana, laboratorium komputer, serta pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Akan tetapi, realisasi program sering terkendala keterbatasan pendanaan dan kemampuan teknis lembaga dalam memenuhi standar

administrasi pendidikan yang baru. Menurut Yogita Satria selaku Kepala Utama Widyalyaya Kejuruan Parisada Karangasem, lembaga telah menyusun rencana pengembangan jangka menengah, tetapi implementasinya masih mengalami hambatan pada aspek pendanaan dan pengembangan fasilitas teknologi pendidikan (Wawancara, 7 Juli 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi menuntut kemampuan manajerial yang lebih kompleks, terutama dalam pengelolaan anggaran, perencanaan strategis, dan penyediaan fasilitas pendidikan berbasis digital. Pada aspek pengawasan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pola pengawasan internal yang berbasis pendekatan kekeluargaan dengan tuntutan pengawasan eksternal yang semakin administratif dan berbasis indikator kinerja. Menurut Sekarini selaku tenaga pendidik Utama Widyalyaya Kejuruan Saraswati Singaraja, proses audit eksternal sering kali menimbulkan kesulitan karena kebutuhan dokumentasi dan pelaporan yang sangat rinci (Wawancara, 21 Juli 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian Widyalyaya masih belum memiliki sistem administrasi dan dokumentasi yang sepenuhnya siap menghadapi mekanisme pengawasan pendidikan modern yang berbasis akuntabilitas data. Pada dimensi kelembagaan, problematika adaptasi regulasi baru terlihat pada struktur organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Widyalyaya masih menggunakan pola pengelolaan konvensional berbasis yayasan dan komunitas, sementara regulasi baru menuntut pembentukan sistem kelembagaan yang lebih formal dan terstandarisasi.

Perubahan tersebut mencakup kebutuhan pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI), penguatan sistem administrasi pendidikan, serta pembagian tugas kelembagaan yang lebih spesifik. Namun, penyesuaian tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan jumlah tenaga kependidikan dan tingginya beban kerja internal lembaga. Pada aspek sumber daya manusia, penelitian menemukan bahwa Widyalyaya masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, administrasi pendidikan, sekaligus literasi digital yang memadai.

Menurut Made Suarna selaku Kepala Utama Widyalyaya Sila Kertha Raharja Jembrana, dukungan yayasan terhadap peningkatan kompetensi guru melalui studi lanjut memang telah dilakukan, tetapi sebagian tenaga pendidik masih mengalami hambatan biaya dan beban kerja sehingga pengembangan profesional belum berjalan maksimal (Wawancara, 14 Juli 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan regulasi tidak hanya membutuhkan penyesuaian administratif, tetapi juga transformasi kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti tuntutan pendidikan modern.

Dalam perspektif Hargreaves & Fullan (2012) kemampuan sekolah dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas profesional guru dan dukungan sistem kelembagaan yang memadai. Pada dimensi teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pendidikan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi regulasi baru Widyalyaya. Kebijakan pendidikan terkini menuntut penggunaan sistem administrasi berbasis digital seperti *Education Management Information System* (EMIS), e-rapor, dan pelaporan pendidikan daring lainnya. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital tenaga pendidik dan operator pendidikan masih belum merata. Menurut Sekarini selaku operator administrasi Utama Widyalyaya Kejuruan Saraswati Singaraja, proses penginputan data pada sistem EMIS masih sering mengalami keterlambatan karena keterbatasan pemahaman teknis dan minimnya pelatihan resmi dari pihak terkait (Wawancara, 21 Juli 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pendidikan Widyalyaya belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan infrastruktur, pelatihan teknis, dan penguatan kompetensi digital sumber daya manusia. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksiapan Widyalyaya terhadap regulasi baru bukan disebabkan oleh lemahnya komitmen lembaga pendidikan Hindu, melainkan karena perubahan kebijakan berlangsung lebih cepat dibanding kesiapan sistem kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Problematika adaptasi tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi manajerial yang berkaitan dengan perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan dimensi kelembagaan yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia; serta dimensi teknologi yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi pendidikan. Oleh karena itu, implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 memerlukan dukungan kebijakan lanjutan berupa pelatihan literasi digital, penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pendampingan administrasi pendidikan agar Widyalyaya mampu beradaptasi secara optimal terhadap transformasi sistem pendidikan keagamaan Hindu di Indonesia.

4. Problematika Internal Lembaga

a. Keterbatasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu problematika internal utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Utama Widyalyaya Astika Dharma, Utama Widyalyaya Sila Kertha Raharja, dan Utama Widyalyaya Kejuruan (UWK) Widya Wisata. Problematika tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu keterbatasan jumlah tenaga pendidik, keterbatasan kompetensi profesional guru, serta belum adanya guru penggerak yang mampu menjadi agen inovasi pembelajaran.

Pada aspek kuantitas, jumlah tenaga pendidik yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan pembelajaran dan administrasi sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa guru harus merangkap tugas, bahkan kepala sekolah turut terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas di tengah tanggung jawab administratif yang tinggi. Situasi ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi manajerial sekolah maupun efektivitas pembelajaran di kelas (Seliyanti, Kiriana & Wulandari, 2025). Keterbatasan jumlah guru juga menyebabkan proses pembelajaran terganggu ketika terdapat tenaga pendidik yang berhalangan hadir karena tidak tersedia guru pengganti yang memadai.

Pada aspek kompetensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan esensi Kurikulum Merdeka, terutama dalam pengembangan perangkat ajar, pembelajaran diferensiasi, dan pendekatan berbasis proyek. Menurut Yogita Satria selaku Kepala Utama Widyalyaya Kejuruan Parisada Karangasem, lembaga sebenarnya memiliki keinginan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, tetapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan proses pembelajaran masih didominasi metode ceramah konvensional (Wawancara, 7 Juli 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan kompetensi pedagogik guru. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harisan et al., (2023) yang menyebutkan bahwa keterbatasan kompetensi guru menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, khususnya pada aspek pembelajaran inovatif.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan belum adanya guru penggerak yang mampu menjadi motor perubahan dan agen inovasi pembelajaran di lingkungan Widyalaya. Padahal, guru penggerak memiliki peran penting dalam mendampingi rekan sejawat, mengembangkan strategi pembelajaran kreatif, serta memperkuat implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Ketiadaan guru penggerak menyebabkan proses pembelajaran cenderung berjalan monoton dan kurang mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi.

Kondisi tersebut memperkuat pandangan Roesminingsih (2025) bahwa keberadaan guru penggerak sangat penting dalam membangun budaya inovasi pembelajaran di sekolah. Keterbatasan tenaga pendidik dan kependidikan juga berdampak pada tingginya beban kerja guru. Guru tidak hanya bertanggung jawab pada proses pembelajaran, tetapi juga pada administrasi pendidikan dan penyesuaian perangkat Kurikulum Merdeka. Akibatnya, interaksi pedagogis antara guru dan siswa menjadi kurang optimal karena sebagian besar waktu guru terserap pada penyelesaian administrasi dan pemenuhan target pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan pendampingan individual terhadap peserta didik belum berjalan maksimal (Alfath et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di Widyalaya tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga pendidik, tetapi juga menyangkut kualitas kompetensi profesional dan kapasitas inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia melalui rekrutmen tenaga pendidik, pelatihan profesional berkelanjutan, pengembangan kompetensi Kurikulum Merdeka, serta penguatan peran guru penggerak menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung implementasi pendidikan Widyalaya yang lebih adaptif dan berkualitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Oktavia (2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

b. Minimnya Bahan Ajar dan Media Pembelajaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran menjadi salah satu problematika utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Utama Widyalaya Astika Dharma Karangasem, Utama Widyalaya Sila Kertha Raharja Jembrana, dan Utama Widyalaya Kejuruan (UWK) Widya Wisata. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan minimnya fasilitas fisik sekolah, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas proses pembelajaran, kreativitas guru, serta partisipasi siswa dalam kegiatan belajar.

Berdasarkan hasil observasi di Utama Widyalaya Astika Dharma Karangasem, perpustakaan sekolah masih memiliki koleksi buku yang terbatas, terutama pada mata pelajaran keagamaan Hindu seperti *tattwa*, *susila*, acara agama Hindu, dan sejarah kebudayaan Hindu. Sebagian besar buku yang digunakan merupakan koleksi lama dan belum sepenuhnya mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, fasilitas laboratorium komputer belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan perangkat dan akses internet. Kondisi tersebut menyebabkan guru lebih banyak menggunakan metode pembelajaran konvensional berbasis ceramah dan penugasan tertulis.

Menurut Ketut Sueni selaku Kepala Utama Widyalaya Astika Dharma Karangasem, sekolah telah beberapa kali mengajukan bantuan pengadaan fasilitas pembelajaran, tetapi realisasinya masih terbatas sehingga guru dan siswa hanya mengandalkan sumber belajar yang tersedia di sekolah (Wawancara, 28 Juli 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan berdampak langsung pada akses siswa terhadap sumber belajar yang lebih variatif dan kontekstual. Hasil observasi di Utama Widyalaya Sila Kertha

Raharja Jembrana juga menunjukkan kondisi serupa. Proses pembelajaran sebagian besar masih berlangsung secara satu arah karena keterbatasan media interaktif dan bahan ajar digital. Dalam beberapa kelas, guru menggunakan satu buku pegangan utama untuk seluruh siswa tanpa dukungan media visual maupun perangkat pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Made Suarna selaku Kepala Utama Widyalyaya Sila Kertha Raharja Jembrana, keterbatasan fasilitas media pembelajaran menyebabkan siswa lebih cepat merasa jenuh dan kurang aktif dalam proses pembelajaran (Wawancara, 14 Juli 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa minimnya media pembelajaran memengaruhi tingkat partisipasi dan motivasi belajar peserta didik. Pada Utama Widyalyaya Kejuruan Widya Wisata, keterbatasan media pembelajaran terlihat pada belum optimalnya penggunaan perangkat pembelajaran digital dalam kegiatan praktik kejuruan. Berdasarkan hasil observasi, beberapa perangkat komputer yang tersedia belum mampu mendukung pembelajaran berbasis multimedia secara maksimal. Selain itu, keterbatasan akses internet menyebabkan guru mengalami kesulitan memanfaatkan sumber belajar daring dan aplikasi pembelajaran interaktif.

Akibatnya, pembelajaran berbasis proyek yang menjadi salah satu karakteristik Kurikulum Merdeka belum dapat dilaksanakan secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran berdampak pada tiga aspek utama. Pertama, proses pembelajaran menjadi kurang variatif karena guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan hafalan. Kedua, siswa mengalami keterbatasan dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis karena minimnya pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi media digital.

Ketiga, keterbatasan fasilitas juga memengaruhi kreativitas guru dalam merancang strategi pembelajaran inovatif sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Oktavia (2023) yang menyatakan bahwa keterbatasan media pembelajaran berdampak pada rendahnya motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Penelitian Harisan (2023) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana pendidikan menyebabkan guru kesulitan mengembangkan pembelajaran inovatif dan kontekstual. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan fasilitas pendidikan Widyalyaya memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas implementasi Kurikulum Merdeka dengan realitas sarana pembelajaran di lapangan.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan media pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan dukungan kelembagaan dan pembiayaan pendidikan. Menurut Ketut Sueni selaku Kepala Utama Widyalyaya Astika Dharma Karangasem, pengadaan media pembelajaran digital memerlukan dukungan pemerintah dan *stakeholder* pendidikan karena kemampuan pendanaan sekolah masih sangat terbatas (Wawancara, 21 Juli 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak dapat hanya dibebankan pada guru dan sekolah, tetapi memerlukan dukungan struktural berupa penguatan sarana-prasarana pendidikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya bahan ajar dan media pembelajaran menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi kualitas implementasi Kurikulum Merdeka di Widyalyaya. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya variasi pembelajaran, terbatasnya inovasi pedagogik guru, serta belum optimalnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran aktif dan kontekstual. Oleh karena itu, penguatan fasilitas pendidikan melalui pengadaan bahan ajar, media pembelajaran digital, perpustakaan, laboratorium, dan pelatihan pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi kebutuhan penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan Widyalyaya secara berkelanjutan.

5. Permasalahan Eksternal

a. Minimnya Dukungan *Stakeholder*, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya dukungan *stakeholder*, masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi salah satu problematika utama dalam pengelolaan Widyalyaya dan implementasi Kurikulum Merdeka di Utama Widyalyaya Astika Dharma Karangasem, Utama Widyalyaya Sila Kertha Raharja Jembrana, dan Utama Widyalyaya Kejuruan (UWK) Widya Wisata. Dukungan tersebut mencakup aspek pembiayaan, penyediaan sarana-prasarana, penguatan kebijakan pendidikan daerah, hingga keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Widyalyaya.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan dukungan eksternal berdampak langsung pada kualitas tata kelola pendidikan dan efektivitas implementasi kurikulum di tingkat sekolah. Pada aspek masyarakat dan orang tua peserta didik, hasil observasi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam mendukung proses pembelajaran masih relatif rendah. Sebagian besar orang tua masih memandang pendidikan sebagai tanggung jawab utama sekolah, sehingga pendampingan belajar siswa di rumah belum berjalan optimal. Menurut Ketut Sueni selaku Kepala Utama Widyalyaya Astika Dharma Karangasem, masih banyak peserta didik yang datang ke sekolah tanpa persiapan belajar yang memadai karena kurangnya pendampingan dari keluarga di rumah (Wawancara, 28 Juli 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran aktif dan mandiri belum sepenuhnya didukung oleh lingkungan keluarga sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas sekolah, tetapi juga dipengaruhi partisipasi sosial masyarakat. Dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari konsep manajemen berbasis sekolah yang menempatkan masyarakat dan orang tua sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan.

Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan sekolah mengalami keterbatasan dukungan sosial maupun material dalam pengembangan program pendidikan Widyalyaya. Selain faktor masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap Widyalyaya juga belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi lapangan, beberapa fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran digital masih berada dalam kondisi terbatas. Di Utama Widyalyaya Astika Dharma Karangasem, misalnya, pembangunan beberapa fasilitas pendidikan belum selesai secara optimal karena keterbatasan dukungan anggaran.

Sementara itu, di Utama Widyalyaya Sila Kertha Raharja Jembrana, keterbatasan fasilitas pembelajaran menyebabkan proses pembelajaran masih didominasi metode ceramah tanpa dukungan media pembelajaran interaktif. Menurut Yogita Satria selaku Kepala Utama Widyalyaya Kejuruan Parisada Karangasem, pihak sekolah telah beberapa kali mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, tetapi proses koordinasi dan realisasi bantuan masih berjalan lambat sehingga kebutuhan sekolah belum terpenuhi secara maksimal (Wawancara, 7 Juli 2025).

Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan koordinasi kelembagaan antara pengelola Widyalyaya dengan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pendidikan keagamaan Hindu. Dalam konteks sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia, pemerintah daerah sebenarnya memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan satuan pendidikan melalui kebijakan anggaran, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan

penguatan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Widyalaya dalam sistem pendidikan daerah masih belum memperoleh perhatian yang setara dibandingkan sekolah umum lainnya.

Akibatnya, dukungan kebijakan dan pembiayaan pendidikan untuk Widyalaya masih relatif terbatas, terutama pada aspek pengembangan sarana-prasarana dan media pembelajaran. Minimnya dukungan *stakeholder* juga terlihat pada keterbatasan kemitraan dengan sektor swasta maupun lembaga eksternal lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pengembangan fasilitas pendidikan masih bergantung pada kemampuan yayasan dan dukungan masyarakat lokal. Padahal, implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan dukungan pembelajaran berbasis teknologi, penguatan literasi digital, serta pengembangan pembelajaran berbasis proyek yang memerlukan biaya cukup besar. Kondisi ini menyebabkan sekolah mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran modern.

Menurut Made Suarna selaku Kepala Utama Widyalaya Sila Kertha Raharja Jembrana, peserta didik sebenarnya memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi, tetapi keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran membuat proses belajar menjadi kurang menarik dan kurang interaktif (Wawancara, 14 Juli 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan dukungan *stakeholder* berdampak langsung terhadap kualitas pengalaman belajar siswa di Widyalaya. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika dukungan *stakeholder* dan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pembiayaan pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan posisi Widyalaya dalam sistem kebijakan pendidikan daerah di era desentralisasi pendidikan.

Keterbatasan dukungan masyarakat, lemahnya koordinasi kelembagaan, belum optimalnya perhatian pemerintah daerah, serta terbatasnya kemitraan eksternal menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka di Widyalaya belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola Widyalaya, masyarakat, dan *stakeholder* pendidikan melalui kebijakan afirmatif, penguatan pembiayaan pendidikan, pengembangan kemitraan strategis, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar keberlanjutan pendidikan Widyalaya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Terbatasnya Dukungan Pemerintah Daerah

Terbatasnya dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlanjutan tata kelola dan implementasi kebijakan pendidikan pada Utama Widyalaya di Provinsi Bali. Dalam sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam mendukung penyediaan sarana-prasarana, fasilitasi pembiayaan, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan mutu pendidikan berbasis kebutuhan lokal (Winingsih, 2016; Bawor, 2023). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap widyalaya belum berjalan optimal, sehingga sebagian besar lembaga masih bergantung pada bantuan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan kemampuan yayasan pengelola. Kondisi tersebut menyebabkan proses adaptasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dan PMA Nomor 2 Tahun 2024 berlangsung tidak merata.

Secara empiris, keterbatasan dukungan pemerintah daerah terlihat pada aspek pembangunan infrastruktur pendidikan. Hasil observasi di Utama Widyalaya Sila Kertha Raharja menunjukkan bahwa beberapa ruang pembelajaran belum sepenuhnya memenuhi standar sarana pendidikan karena proses pembangunan berjalan secara bertahap menyesuaikan kemampuan pendanaan yayasan. Made Suarna selaku Kepala Utama Widyalaya Sila Kertha Raharja menyatakan bahwa sekolah telah beberapa kali mengajukan

proposol pembangunan ruang kelas kepada pemerintah daerah, namun realisasinya berjalan lambat sehingga sekolah harus memanfaatkan ruang serbaguna sebagai kelas sementara (Wawancara, 14 Juli 2025).

Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan riil lembaga pendidikan keagamaan Hindu dengan prioritas pembangunan pendidikan daerah. Padahal, kualitas sarana-prasarana memiliki hubungan langsung terhadap efektivitas pembelajaran dan kenyamanan peserta didik (Rahardjo, 2014; Asrama, 2021). Keterbatasan dukungan pemerintah daerah juga tampak pada minimnya bantuan fasilitas pembelajaran dan sumber belajar. Berdasarkan hasil observasi lapangan, perpustakaan pada beberapa widyalaya masih memiliki koleksi buku yang terbatas, khususnya buku ajar berbasis Kurikulum Merdeka dan literatur pendidikan Hindu.

Laboratorium komputer juga belum sepenuhnya mampu menunjang pembelajaran digital karena keterbatasan perangkat dan jaringan internet. Kondisi tersebut menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi sebagaimana dituntut dalam Kurikulum Merdeka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harisan et al., (2023) yang menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi hambatan utama implementasi kurikulum pada sekolah berbasis keagamaan dan sekolah di daerah.

Dalam aspek kebijakan pendidikan daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa widyalaya belum sepenuhnya memperoleh posisi yang setara dengan sekolah umum dalam distribusi bantuan pendidikan. Sebagian informan menyatakan bahwa bantuan pemerintah daerah lebih banyak diarahkan kepada sekolah negeri, sementara lembaga pendidikan berbasis agama masih berada pada posisi marginal dalam perencanaan pembangunan pendidikan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Hindu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Suda, 2017).

Akibatnya, widyalaya mengalami kesulitan dalam mempercepat pengembangan mutu kelembagaan, terutama pada aspek digitalisasi pembelajaran, pengadaan media pendidikan, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Permasalahan lain yang ditemukan adalah lemahnya koordinasi antara lembaga widyalaya dengan pemerintah daerah. Yogita Satria selaku Kepala Utama Widyalaya Kejuruan Parisada Karangasem menyatakan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah karena komunikasi dan pemetaan kebutuhan belum berjalan secara efektif (Wawancara, 7 Juli 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya terletak pada keterbatasan bantuan, tetapi juga pada mekanisme komunikasi kebijakan yang belum partisipatif. Dalam perspektif tata kelola pendidikan, koordinasi yang lemah menyebabkan kebijakan daerah cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan empiris lembaga pendidikan (Seliyanti et al., 2025). Keterbatasan dukungan pemerintah daerah juga berdampak pada meningkatnya beban manajerial lembaga. Kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi akademik dan administratif, tetapi juga harus mencari sumber pendanaan alternatif melalui yayasan, masyarakat, maupun jejaring eksternal.

Pada saat yang sama, guru dituntut tetap menjalankan pembelajaran inovatif meskipun sarana dan dukungan pelatihan masih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan profesional (*professional fatigue*) pada tenaga pendidik karena beban kerja yang tidak seimbang dengan dukungan kelembagaan yang diterima (Khoirurrijal et al., 2022). Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya inisiatif positif dari

pemerintah daerah di Bali. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat di Kabupaten Buleleng melalui pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya dan Pasraman.

Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi, dukungan pembiayaan, dan keberlanjutan pendidikan keagamaan Hindu di tingkat lokal. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, langkah tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa pengembangan widyalaya tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam pembangunan pendidikan berbasis kearifan lokal dan identitas budaya Hindu di Bali.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya telah memberikan arah baru dalam penguatan tata kelola pendidikan keagamaan Hindu di Indonesia. Regulasi ini mempertegas posisi widyalaya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui penguatan aspek kelembagaan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sistem penjaminan mutu. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara tuntutan regulasi dengan realitas implementasi di lapangan. Ketidaksiapan lembaga dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan terlihat pada aspek manajerial, kelembagaan, dan digitalisasi administrasi pendidikan. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik, minimnya bahan ajar dan media pembelajaran, serta rendahnya dukungan *stakeholder* dan pemerintah daerah menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di widyalaya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan dukungan sarana-prasarana, lemahnya koordinasi kebijakan daerah, serta ketergantungan lembaga terhadap bantuan pusat menyebabkan proses transformasi tata kelola widyalaya berjalan belum optimal. Meskipun demikian, beberapa widyalaya mampu menunjukkan praktik adaptif melalui penguatan kolaborasi internal, pengembangan kurikulum berbasis nilai Hindu, serta upaya inovatif dalam mempertahankan keberlanjutan lembaga pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pendidikan widyalaya secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan widyalaya melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sistem tata kelola berbasis digital, serta penyediaan bahan ajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Merdeka dan karakteristik pendidikan Hindu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu memperkuat sinergi kebijakan melalui dukungan pendanaan, pemerataan bantuan sarana-prasarana, serta pembentukan regulasi daerah yang mendukung keberlanjutan widyalaya. Selain itu, keterlibatan *stakeholder*, yayasan, dan masyarakat Hindu perlu ditingkatkan agar pengembangan widyalaya tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi menjadi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan keagamaan Hindu secara kolektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdulah, M. K., Fauzi, I. K. A., & Sudrajat, A. (2022). Manajemen Strategi Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan. *Jurnal Simki Pedagogia*, 5(2), 200-208.
- Alfath, A., Azizah, F. N., & Setiabudi, D. I. (2022). Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(2), 42-50.
- Alim, M. S., & Munib, A. (2021). Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Madrasah. *Jurnal Progress*, 9(2), 263-285.
- Ana, I. K. T. A. (2024). *Penerapan Konsep Dana Dunia Menjadi Dana Abadi Untuk Mewujudkan Pasraman Formal Yang Berkelanjutan*. Singaraja: Yayasan Mertajati Widya Mandala.
- Alawiyah, F. (2017). Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 81-92.
- Asmara, Q. (2021). Implementasi Kebijakan Dan Mutu Pendidikan: Penerapan Delapan Standar Pendidikan Nasional Di SMA Mutiara Bunda Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 2(1), 119-125.
- Aziz, A. Z. (2015). Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *El-Tarbawi*, 8(1), 69-92.
- Bawor, E., & Ahmad, M. (2023). Strategi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Pendidikan Anak Papua. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 167-176.
- Fauzi, A., Rahmat, D., & Suryana, I. (2024). Pengembangan Media Pembelajaran Digital Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, 14(1), 55-67.
- Harisan, M., Nugraha, A., & Pratama, Y. (2023). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 8(2), 120-132.
- Irianto, H. A. (2017). *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta Selatan: Kencana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya*. Kementerian Agama RI.
- Khoirurrijal, K., Fadriati, F., Sofia, S., Anisa, M. D., Sunaryo, G., Abdul, M., & Suprapno, S. (2022). *Pengembangan Kurikulum Merdeka*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kiriana, I. N. (2021). Pasraman Branding: Tantangan Dan Strategi. *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 5, 110-121.
- Lilawati, A. (2020). Peran Orang Tua Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran Di Rumah Pada Masa Pandemi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 549-558.
- Lumowa, F., Nayoan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi Di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2), 1-10.

- Mujiwati, Y. (2018). Peranan Pendidikan Karakter Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Ilmiah Edukasi & Sosial*, 8(2), 165-170.
- Mustika, D. (2021). Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Peserta Didik Di Masa Pembelajaran Daring. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 1(2), 361-372.
- Prihatin, B. (2020). Peran Madrasah Dalam Membangun Moderasi Agama Di Indonesia Di Era Milenial. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 136-150.
- Purnomo, I. (2023). Perjuangan Pasraman Formal Agar Tetap Eksis Sebagai Lembaga Pendidikan di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 13(1), 274-292.
- Purwani, R., Fathoni, A., Sarilan, S., & Siswanto, H. (2025). Transformasi Administrasi Pendidikan Untuk Mengoptimalkan Efisiensi Dan Kualitas Layanan Pendidikan Pada Era Digital. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 4(1), 53-58.
- Raharjo, S. B. (2014). Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(4), 470-482.
- Rifa'i, M. (2019). Manajemen Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Kualitas Layanan Pendidikan. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 30-44.
- Roesminingsih, E. (2025). Peran Guru Penggerak Dalam Transformasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia*, 6(1), 45-58.
- Seliyanti, A. W., Akbar, A., & Solihin, F. K. (2025). Pengaruh Metode Pembelajaran Poster Comment Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran IPAS Materi Peraturan Tertulis Dan Tidak Tertulis. *Sebelas April Elementary Education*, 4(1), 143-152.
- Suda, I. K. (2017). Pasraman Sebagai Energi Pendidikan Agama Dan Seni Hindu Dalam Dominasi Dan Hegemoni Pendidikan Modern. *SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(3), 364-373.
- Sudarsana, I. K. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Dalam Implementasi Kurikulum Di Sekolah: Perspektif Teori Konstruktivisme. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 8-15.
- Sudarsana, I. K. (2018). *Pendidikan Karakter Hindu*. Denpasar: Jayapangus Press.
- Sudarsana, I. K., Putra, I. B. M. A., Astawa, I. N. T., & Yogantara, I. W. L. (2019). The Use of Google Classroom In The Learning Process. *Journal of Physics: Conference Series*, 1175(1), 1-5.
- Sukrawati, M., Gitananda, W. S., Kiswara, K. A. T., Putra, I. G. A. D., Sumadiyasa, I. K., Sudarsana, M., & Dwipayana, A. P. (2022). Penguatan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Hindu di Taman Kanak-Kanak Desa Adat Tambawu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. *Jurnal Sewaka Bhakti*, 8(2), 164-175.
- Supriadi, I. M. A., Sunaryanti, I. K., Diantara, I. K. G., Purwanti, I. N. R. T., & Sumarsiani, N. L. (2025). Model Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu Berbasis Teknologi Untuk Penguatan Karakter Religius Generasi Muda. *Acintya: Jurnal Teologi, Filsafat dan Studi Agama*, 1(4), 23-41.
- Sutrianti, N. K. (2019). Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Hindu di Yayasan Pasraman Gurukula Bangli Provinsi Bali. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 2(2), 41-53.
- Triwijayanti, N., Sanoto, H., & Paseleng, M. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan Pendidikan, Budaya Sekolah, Dan Citra Sekolah Terhadap Kepuasan Orang Tua. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 74-80.

- Umar, M. (2015). Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(1), 20-28.
- Windasari, W., Roesminingsih, E., Setiawan, A. C., Dzulquarnain, A. H., & Phan, H. P. (2025). Transformational Leadership In Education: How PLCs, Self-Efficacy, And Motivation Drive Innovative Teaching. *Multidisciplinary Reviews*, 8(7), 2025205.
- Winingsih, L. H. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(1), 37-57.